

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada penghujung 2019, dunia internasional dikejutkan dengan munculnya suatu virus berbahaya dan bersifat menular yang disebut *Corona Virus Disease* (Covid-19). *World Health Organization* (WHO) menetapkan perubahan status dari epidemi ke pandemi pada 11 Maret 2020 karena wabah terjadi serempak dan meliputi geografis yang luas (Kemendikbud, 2021). Pandemi Covid-19 merupakan krisis global dengan dampak meluas pada sistem sosial, ekonomi, dan politik (Carlsson-Szlezak et al., 2020). Dalam rangka merespon adanya pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia mengambil Tindakan cepat dengan mengeluarkan kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pembatasan sosial berskala besar sesuai. Kebijakan ini membatasi aktivitas perekonomian karena masyarakat diwajibkan untuk lebih banyak beraktivitas di rumah. Hal ini menyebabkan penutupan berbagai usaha yang menjadi mata pencaharian masyarakat sehingga situasi perekonomian teguncang (Rizal et al., 2021). Upaya perusahaan dan pengusaha untuk mempertahankan bisnisnya mendorong adanya kebijakan untuk mengefisiensikan sumber daya dan biaya.

Salah satu kebijakan yang banyak dilakukan adalah pengurangan kapasitas produksi yang berdampak pada pengurangan jumlah sumber daya manusia dalam aktivitas produksi. Dampaknya adalah pemberhentian hubungan kerja yang menyebabkan kenaikan jumlah pengangguran yang pada akhirnya banyak keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Fahri et al., 2019). Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2021 menurun 1,04 juta orang dibandingkan Maret 2021 yaitu sebesar menjadi sebesar 26,50 juta orang. Jika dibandingkan terhadap September 2020, jumlah penduduk miskin menurun 1,05 juta orang (BPS, 2022). Pemerintah selaku pelaksana negara memiliki kewajiban untuk mengentas kemiskinan yang terdapat di Indonesia dalam rangka pengimplementasian nilai-nilai dasar negara (Pancasila) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Kementerian PUPR, 2006).

Dampak pandemi Covid-19 yang masif mengancam kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin. Pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pemberian bantuan sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2012, bantuan sosial meliputi pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa dari pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat. Pemberian bantuan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas risiko sosial yang mungkin terjadi serta memberikan peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan (Kemenkeu, 2019).

Sehubungan dengan dampak pandemi yang semakin meluas, Kementerian Sosial mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merupakan sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak terperosok dalam kemiskinan di masa pandemi. Program bantuan sosial bersyarat ini diberikan dalam rangka penganggulangan kemiskinan di masyarakat. Sebelum pandemi covid-19 tepatnya pada 2018, terdapat 10.000.232 penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan dengan Rp17,5 triliun alokasi dana (Kemensos, 2019). Pada 2020, setelah pandemi membawa efek domino di Indonesia, alokasi anggaran PKH sebesar Rp36,9 triliun untuk 10 juta KPM (Kemenkeu, 2020).

Tabel I.1 Jumlah KPM dan Alokasi Anggaran 2016 s.d. 2020

No.	Tahun	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	Alokasi Anggaran
1.	2016	5.981.528 KPM	Rp7,6 Triliun
2.	2017	6.228.810 KPM	Rp11,3 Triliun
3.	2018	10.000.232 KPM	Rp17,5 Triliun
4.	2019	9.841.270 KPM	Rp32,7 Triliun
5.	2020	10.000.000 KPM	Rp36,9 Triliun

Sumber: Kementerian Sosial (2019)

Respon Kementerian Sosial berupa peningkatan alokasi bantuan sosial PKH tentunya berdampak pada dana PKH yang semakin besar di daerah. Pada 2020, penerima PKH di Kabupaten Gianyar sebanyak 9.436 KPM (Ari, 2021). Beberapa penulis sudah melakukan riset mengenai penyaluran PKH di masa

pandemi. Penelitian yang dilakukan Sari (2021) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dan proses penyaluran bantuan sosial yang diterima keluarga penerima manfaat di Desa Singosaren. Penelitian lainnya dilakukan oleh Chasanah et al (2021) terkait dengan implementasi PKH pada Dinas Sosial Kota Surabaya setelah adanya pandemi dan era adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) menunjukkan keberhasilan implementasi PKH. Kesimpulan penelitian tersebut berdasarkan penurunan angka kemiskinan yang didukung dengan beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Butar-butar et al (2021) pada Kecamatan Jambi Timur menunjukkan hasil yang berbeda. Rata-rata jawaban responden terkait implementasi kebijakan bantuan sosial PKH Di Kecamatan Jambi masuk dalam kategori “kurang”. Hal ini berarti implementasi PKH di Kecamatan Jambi belum memenuhi prinsip 3T (tepat waktu, tepat sasaran, dan tetap jumlah). Selain itu, kualitas komunikasi serta data-data yang tidak valid menyebabkan bantuan kurang tepat sasaran. Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memasukan komponen arah kebijakan terkait dengan tambahan alokasi dana PKH di masa pandemi Covid-19.

Dinas Sosial Kabupaten Gianyar yang terletak di Provinsi Bali mengatakan bahwa bantuan PKH semakin ketika pandemi Covid-19 terjadi. Hal mendasari yang menyebabkan kenaikan ini adalah pandemi yang tidak hanya memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat kelas rentan khususnya yang masuk dalam garis kemiskinan (Fadhlurrahman, 2021). Kebijakan pembatasan sosial menyebabkan masyarakat Bali terdampak secara langsung

maupun tidak langsung karena 80 persen masyarakatnya bergantung pada sektor pariwisata (Wibawa, 2020). GIPI selaku gabungan pengusaha pariwisata yang terdapat di Bali memperkirakan kerugian di bidang kepariwisataan Bali pada 2020 sebesar Rp138,6 triliun atau US\$9 miliar akibat tren penurunan wisatawan selama pandemi Covid-19.

Tren penurunan wisatawan ditunjukkan dengan data kunjungan wisatawan per 13 April 2020 yang dilaporkan menurun sebesar 93,24 persen (Adnyana, 2020). Selain itu, masyarakat Bali yang masih berkesempatan bekerja tidak mendapatkan penghasilan yang optimal karena terjadi penurunan pendapatan sebesar 40,67 persen sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Indonesia dalam *Economic and Investment Forum 2021* (Rosana, 2021). Dalam, situasi seperti ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat yang mengalami kerentanan (Akhmadi, 2017). Program bantuan sosial adalah salah satu bentuk implementasi perlindungan pemerintah kepada masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah dalam bentuk barang, jasa, maupun transfer uang dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat (DJPB, 2020). Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Evaluasi Atas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Gianyar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis menemukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme dan arah kebijakan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar pada masa pandemi?
2. Bagaimana evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar dengan ketentuan/peraturan terkait?
3. Apa perbedaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan sebelum dan saat pandemi?
4. Apa kendala dan tantangan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penulis menemukan beberapa tujuan yaitu sebagai berikut.

1. Meninjau mekanisme dan arah kebijakan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar pada masa pandemi.
2. Mengevaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar dengan ketentuan/peraturan terkait
3. Mengidentifikasi perbedaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan sebelum dan saat pandemi.

4. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan pada masa pandemi Covid-19. Program Keluarga Harapan memiliki keunikan tersendiri dengan timbulnya kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima PKH dan pendamping di setiap wilayah untuk memantau penerima PKH (Khoiriyah, 2019). Ketidakstabilan kondisi berbagai sektor di masa pandemi dan keunikan PKH dibandingkan program bantuan sosial lainnya menjadi dasar penelitian ini. Selain itu, tambahan alokasi dana untuk Program Keluarga Harapan di masa pandemi membuat penulis ingin mengidentifikasi arah kebijakan Program Keluarga Harapan terkini.

Terkait dengan objek penelitian, penulis membatasi penelitian pada Kabupaten Gianyar. Penulis memilih objek ini karena Gianyar merupakan daerah yang masyarakatnya bergantung pada sektor pariwisata sehingga terkena dampak pandemi yang signifikan (Megaartha, 2020). Oleh karena itu, penulis melakukan tinjauan atas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan pada Kabupaten Gianyar di masa pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir diharapkan mampu meningkatkan ilmu pengetahuan pembaca terkait belanja bantuan sosial Program Keluarga Harapan, serta memberikan manfaat keilmuan berupa tambahan literatur tentang penelitian di masa pandemi dan bantuan sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Pusat

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan referensi bagi pemerintah pusat mengenai pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan di daerah supaya penyaluran bantuan sosial menjadi lebih efektif dan efisien.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mengidentifikasi kendala penyaluran Program Keluarga Harapan sehingga manfaat bantuan sosial ini semakin optimal untuk masyarakat Kabupaten Gianyar.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat penjabaran mengenai latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, tujuan penulisan, ruang lingkup yang ditelaah, dan manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini mengelaborasi salah satu belanja negara yaitu belanja bantuan sosial khususnya melalui Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kabupaten Gianyar. Selain itu, bagian ini memuat penjelasan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan bahasan KTTA penulis yaitu perkembangan arah kebijakan Program Keluarga Harapan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, serta kendala dan manfaat yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial ini. Dikarenakan penulis mengambil kejadian yang baru saja terjadi pada 2020-2021 dan sampai saat ini masih berlangsung, tidak banyak penelitian terdahulu yang membahas secara spesifik mengenai penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di masa pandemi Covid-19. Namun, beberapa peneliti sudah melakukan penelitian terhadap mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini dibagi menjadi tiga buah pokok bahasan yaitu terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan

pembahasan hasil penelitian. Pada bagian metode pengumpulan data, penulis akan memaparkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan data KTTA. Pada bagian gambaran umum objek penulisan akan menguraikan informasi mengenai belanja bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang memiliki relevansi dengan masalah dan tujuan yang dikemukakan. Pada bagian pembahasan hasil akan dilakukan pembahasan mengenai hasil pengumpulan dan pengolahan data secara deskriptif. Dalam hal ini, penulis akan membandingkan antara penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan setelah pandemi Covid-19 dengan sebelum pandemi Covid-19 yang terdapat pada teori, peraturan, dan/atau hasil penelitian yang sudah dilakukan. Bagian pembahasan akan penulis isi dengan pemaparan hasil analisis dan proses berpikir penulis terhadap data dan fakta yang diperoleh selama proses pengumpulan data di lapangan. Data-data ini penulis dapatkan dari Dinas Sosial Kabupaten Gianyar dan wawancara dengan tiga pihak yaitu dari sisi akademisi, praktisi, dan penerima bantuan. Segala informasi yang penulis dapatkan baik secara implisit dan eksplisit akan diolah kembali sesuai dengan relevansi objek yang diteliti dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini.

BAB IV SIMPULAN

Penulis mengungkapkan simpulan yang dibuat berdasarkan penguraian pada bab I sampai dengan bab III. Simpulan ini akan menjawab

rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan sesuai dengan yang telah dikemukakan di awal.